

# **BAB I**

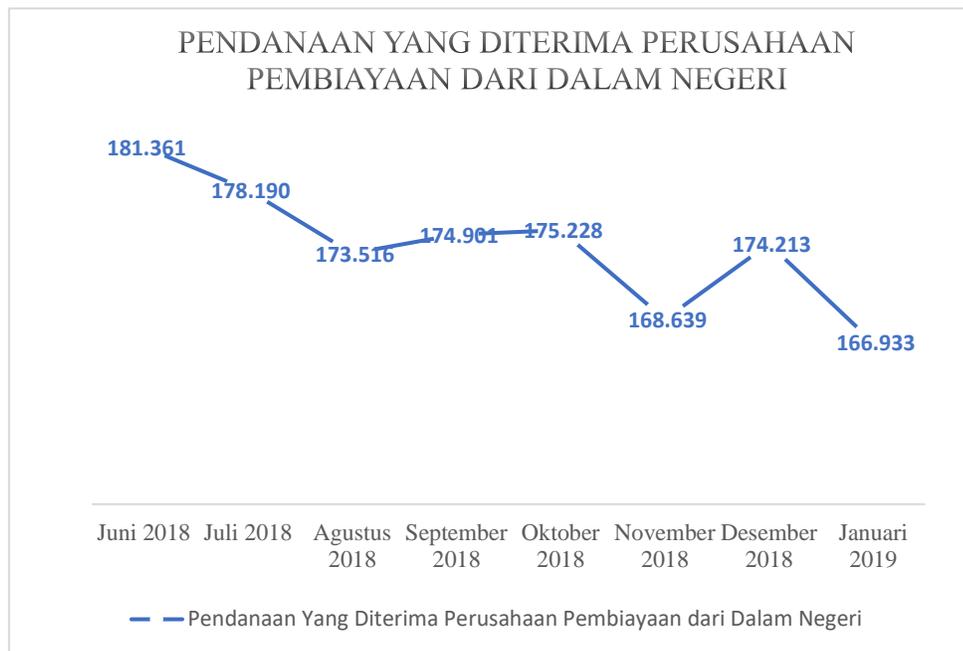
## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance merupakan lembaga keuangan bukan bank yang berperan dalam hal pembiayaan dan pengelolaan sumber dana pembangunan di Indonesia dan dapat memberikan manfaat bagi dunia usaha baik kecil, menengah, besar dan pemerintah. Perusahaan ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa (Peraturan OJK No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan). Menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno sumber pendanaan industri multifinance masih dominan berasal dari pinjaman bank sekitar 70% dan sisanya dari penerbitan surat utang dan ekuitas perusahaan karena pendanaan dari bank dinilai lebih cepat dan mudah ketimbang surat utang dan obligasi.

Namun, pada tahun 2019 perbankan mulai lebih selektif sehingga pendanaan kepada kredit multifinance berkurang dibanding tahun 2018. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pendanaan dari dalam negeri untuk perusahaan Multifinance turun 7,9% menjadi Rp.166,93 triliun per Januari 2019 dibanding Juni 2018 senilai Rp.181,4 triliun.

**Gambar 1.1 Pendanaan Yang diterima Perusahaan Pembiayaan dari Dalam Negeri**



*Sumber :Statistik lembaga pembiayaan (OJK, 2019)*

Penurunan ini dikarenakan perbankan semakin hati-hati dalam memberikan pinjaman, yang dipicu adanya kasus *double finance* dan *multiple finance* yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan Multifinance. Salah satu contoh kasus yang menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada Perusahaan Pembiayaan adalah kasus SNP Finance. Sun Prima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance adalah perusahaan pembiayaan dari perusahaan Columbia yang merupakan perusahaan *retail* produk perabot rumah tangga dengan jumlah outlet yang sangat banyak, tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Columbia menyediakan opsi pembelian secara kredit kepada konsumennya sehingga kebutuhan modal kerja (*working capital*) dalam jumlah besar yang timbul akibat penjualan kredit ini ditutupi oleh pendanaan dari perusahaan SNP Finance. Layaknya perusahaan pembiayaan lainnya SNP Finance menghimpun dana melalui pinjaman Bank.

Keputusan Bank untuk memberikan kredit tentu bergantung pada informasi keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen SNP

Regina Rahmadella, 2021

**PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CAPITAL STRUCTURE PERUSAHAAN MULTIFINANCE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2015-2018**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Finance. Namun, performa penjualan Columbia menurun dan untuk melunasi hutangnya kepada Bank tersebut SNP Finance mengeluarkan MTN (*Medium Term Notes*) dengan jaminan piutang fiktif melalui penjualan fiktif dan dokumen fiktif yang berisi data customer Columbia yang berujung pada bermasalahnya kredit SNP Finance kepada para krediturnya. Sehingga SNP Finance sejak bulan Mei 2018 berada dalam status dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha oleh OJK karena tidak menyampaikan keterbukaan informasi kepada seluruh kreditur dan pemegang MTN (*Medium Term Notes*) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan contoh kasus diatas semakin penting bagi Bank untuk menilai kemampuan perusahaan yang dipinjami dana. Salah satu hal yang diperhatikan oleh Bank sebelum memberikan kredit kepada perusahaan pembiayaan adalah melihat apakah perusahaan pembiayaan tersebut telah melaksanakan *Corporate Governance* dengan baik, hal ini didasari penelitian yang dilakukan Johansson dan Philip (2011) *credit ratings* dan menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *credit ratings* yang mana *credit ratings* ini menjadi dasar keputusan bank memberikan kredit kepada perusahaan tersebut, lemahnya penerapan *Corporate Governance* merupakan salah satu pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan.

Menurut Sutedi (2006, hlm.175) *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai :

*Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.*

Tata kelola perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan yang mana menjelaskan bahwa ada 5 prinsip utama Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang selanjutnya akan di sebut *Good Corporate Governance*, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*),

Regina Rahmadella, 2021

**PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CAPITAL STRUCTURE PERUSAHAAN MULTIFINANCE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2015-2018**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Prinsip tersebut diterapkan dalam struktur dan proses yang dilakukan organ perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan. Organ perusahaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Sehingga, penting untuk memperhatikan ukuran Direksi, jumlah rapat Direksi dan jumlah rapat Dewan Komisaris untuk melihat apakah suatu perusahaan pembiayaan telah melakukan *Good Corporate Governance* dengan baik dan perusahaan dengan landasan tata kelola yang baik akan dapat membuat perusahaan memiliki kinerja yang baik disegala aspek (Paranandhi, 2013). Setelah menilai praktek *Good Corporate Governance* yang dijalankan perusahaan barulah bank dapat menentukan biaya hutang (bunga) yang akan diberikan saat perusahaan tersebut mengajukan permintaan pinjaman, dan biaya hutang tersebutlah yang akan dijadikan dasar pertimbangan perusahaan untuk menentukan seberapa besar jumlah hutang yang layak untuk dipinjam. Peraturan OJK dan hasil penelitian Johansson dan Phillip (2011) bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Setyaningrum (2005) yang menghasilkan ukuran dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi.

Menurut Harjito dan Martono (2010:240) jumlah pendanaan yang diperoleh perusahaan pembiayaan dapat dilihat melalui analisis yang menggambarkan perbandingan atau imbangannya pendanaan jangka panjang perusahaan yang terdiri atas utang jangka panjang dengan modal sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan analisis *capital structure*, yang mana *capital structure* adalah susunan atau perbandingan antara modal sendiri dan pinjaman jangka panjang. Kesuma (2009) mengatakan semakin besar angka rasio *capital structure* berarti semakin banyak jumlah pinjaman jangka panjang yang mana akan meningkatkan beban tetap yang

Regina Rahmadella, 2021

**PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CAPITAL STRUCTURE PERUSAHAAN MULTIFINANCE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2015-2018**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

harus ditanggung perusahaan sehingga akan meningkatkan risiko finansial yaitu risiko ketika perusahaan tidak dapat membayar beban bunga atas utangnya. Kebijakan *capital structure* merupakan suatu *trade off* antara risiko dan tingkat pengembalian, walaupun penambahan utang akan membesarkan risiko perusahaan tetapi sekaligus memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan (Haryanto, 2014). *Trade-off theory* berasumsi bahwa perusahaan akan menggunakan utang sampai tingkat tertentu untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan memanfaatkan pajak akibat penggunaan hutang (Mahardhika and Aisjah, 2014). Dalam penetapan *capital structure* dibutuhkan kerja sama tim yang baik dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan (Rahadian, 2014). Setiap modal yang diperoleh perusahaan mempunyai biaya yang harus dikeluarkan seperti beban utang maupun beban deviden, maka dibutuhkan sebuah mekanisme yang menjamin kepentingan *stakeholder* agar biaya modal menjadi optimal. Menurut *Corporate Governance Perception Index* (2012) tata kelola perusahaan muncul sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan *stakeholder*.

Terdapat banyak variabel yang bisa menggambarkan tentang *corporate governance*. Penelitian ini menggunakan beberapa sub variabel seperti rapat direksi, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris yang diduga memiliki pengaruh terhadap *capital structure* perusahaan multifinance. Peneliti tertarik untuk mengambil variabel-variabel tersebut karena belum memiliki konsistensi dari hasil penelitian terdahulu dan subjek penelitian pun berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak dilakukan disektor manufaktur dan perbankan sedangkan peneliti pengambil sektor *multifinance*. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil (*research gap*) pada penelitian Bulan dan Yuyetta (2014) dengan yang dilakukan Achchuthan (2013) dan Nimalathasan (2013) yang meneliti pengaruh rapat direksi terhadap *capital structure*. Bulan (2014) menemukan pengaruh yang positif antara rapat direksi dengan *capital structure*, semakin sering direksi mengadakan rapat maka *debt ratio* semakin meningkat karena sesuai dengan *Pecking order theory* perusahaan

Regina Rahmadella, 2021

**PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CAPITAL STRUCTURE PERUSAHAAN MULTIFINANCE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2015-2018**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang baik lebih memilih hutang dari pada mengeluarkan saham ketika mereka harus mengeluarkan dana eksternal karena *cost of debt* dinilai lebih murah dari pada *cost of equity*. Penelitian yang dilakukan Achchutan (2013) dan Nimathasan (2013) menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara rapat direksi dan *capital structure*. Selain itu, ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *capital structure* dalam penelitian yang dilakukan oleh Septianty (2012) dan Dewi (2018) menyebutkan bahwa semakin banyak jumlah dewan direksi dalam sebuah perusahaan, akan meningkatkan fungsi monitoring untuk dapat mengoptimalkan operasi perusahaan, semakin besar dewan direksi semakin besar pula jaringan mereka sehingga memiliki keahlian yang lebih besar sesuai dengan bidangnya sehingga tata kelola perusahaan menjadi lebih baik dan memberikan kepercayaan kepada investor untuk meminjamkan dananya. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Shafana (2016) yang menemukan bahwa ukuran dewan direksi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap *capital structure* karena jumlah direksi dinilai tidak penting untuk keputusan struktur modal perusahaan dan tidak ada bukti yang menyatakan jumlah direksi yang optimal untuk pengambilan keputusan yang efektif. Ukuran dewan komisaris dalam penelitian Anizar (2017) menghasilkan pengaruh yang positif terhadap struktur modal yang diprosikan dalam *long-term debt ratio* karena bank merasa lebih percaya diri untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang besar, sedangkan penelitian Rahadian (2014) dan Kurniawan (2014) menghasilkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *capital structure* dengan alasan penambahan anggota komisaris diduga hanya sebagai formalitas belaka.

Hal lain yang diduga dapat mempengaruhi jumlah pendanaan yang diperoleh oleh suatu perusahaan adalah ukuran perusahaan, karena menurut *Trade-off theory* perusahaan besar lebih mudah memperoleh pinjaman karena memiliki risiko kebangkrutan yang rendah dan diikuti oleh penelitian Primantara dan Dewi (2016) yang menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Hal ini disebabkan perusahaan besar cenderung lebih terdiversifikasi dan lebih

Regina Rahmadella, 2021

**PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CAPITAL STRUCTURE PERUSAHAAN MULTIFINANCE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2015-2018**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tahan terhadap resiko kebangkrutan dan memiliki kemungkinan lebih rendah mengalami kesulitan keuangan sesuai dengan *Trade-off theory*. Namun, bertolak belakang dengan penelitian Armelia (2016) dan Krisnanda (2015) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal disebabkan setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan struktur modalnya, pemilihan penggunaan sumber dana baik dari modal sendiri atau pinjaman hutang pasti mempunyai biaya modal yang berbeda-beda dengan tingkat risiko yang berbeda pula.

Penelitian tentang *corporate governance* memang telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, tetapi penelitian tersebut lebih banyak dilakukan disektor manufaktur dan perbankan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap penerimaan dana yang diperoleh oleh perusahaan pembiayaan (*multifinance*) dengan mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Capital structure Perusahaan Multifinance Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2018”**

## 1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah rapat dewan direksi mempengaruhi *capital structure* perusahaan *multifinance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *capital structure* perusahaan *multifinance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *capital structure* perusahaan *multifinance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *capital structure* perusahaan *multifinance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018

Regina Rahmadella, 2021

**PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CAPITAL STRUCTURE PERUSAHAAN MULTIFINANCE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2015-2018**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan:

1. Bukti empiris tentang pengaruh rapat direksi terhadap *capital structure* perusahaan *multifinance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
2. Bukti empiris tentang pengaruh ukuran direksi terhadap *capital structure* perusahaan *multifinance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
3. Bukti empiris tentang pengaruh ukuran komisaris terhadap *capital structure* perusahaan *multifinance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
4. Bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap *capital structure* perusahaan *multifinance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi :

- a. Pembaca dalam memahami pengaruh corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap *capital structure* pada perusahaan multifinance.
- b. Peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan sumber referensi maupun perbandingan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan corporate governance, ukuran perusahaan dan *capital structure*.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada:

Regina Rahmadella, 2021  
**PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP  
CAPITAL STRUCTURE PERUSAHAAN MULTIFINANCE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
(BEI) TAHUN 2015-2018**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Perusahaan multifinance dengan memberikan gambaran mengenai pengaruh corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap *capital structure* perusahaan tersebut sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang tepat.